

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjaminnya keamanan di kawasan Asia Tengah bagi Rusia adalah tujuan terpenting bagi politik luar negeri Rusia dibawah pimpinan Putin. Keterjaminan disini bahwa stabilitas kawasan Asia Tengah akan menjadi proyek politik luar negeri Rusia. Bagi Rusia kawasan menjadi *bergainning position*, kawasan yang direbutkan oleh negara-negara besar untuk menanamkan kepentingan-kepentingan nasionalnya, seperti China, Eropa, Amerika dan Rusia.Keunggulan kompetitif dan komparatif disektor ekonomi, keamanan, politik dan lain-lainnya dimiliki oleh Asia Tengah maka oleh sebab itu Rusia tidak ingin teledor dan kalah langkah untuk mengambil bagian sebagai negara berpengaruh.

Dibawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, Rusia melakukan transformasi kebijakan politik dalam dan luar negeri yang bersifat strategis.Seperti yang disampaikan dalam pidatonya “*The Foundation of this policy is pragmatism, economic effectiveness and priority of national task*”.¹Makna yang disampaikan dalam pidato tersebut, pada intinya Putin mengutamakan perbaikan dalam bidang politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada pertengahan September 2004, Putin mengumumkan “rencana mesin” secara radikal meluncurkan mekanik

¹Lihat pidato pelantikan Presiden Vladimir Putin di depan Dewan Parlemen tanggal 7 Mei 2000, [file:/// Asia](file:///Asia) Tengah Kepentingan Rusia dan potensi konflik Pasca Timur Tengah- Verum Factum (Kebenaran adalah Tindakan).html

mesin generasi ke-lima menggunakan sistem politiknya dengan memusatkan kekuasaan di Kremlin (julukan Pusat Pemerintahan Rusia). Penataan politik ini meliputi: 1.Membangun kekuatan di birokrasi dan pemerintahan; 2.Penundukan dan subordinasi sebagai elemen penting dalam memerintah; 3.Resentralisasi kekuasaan di Kremlin;4.Pengawasan terhadap kaum pembangkang.²Kemajuan Rusia di bawah Putin tidak lepas darisosokindividu Putin yang cerdas, berjiwa pekerja keras, greliyawan dan militan.Putin menginginkan Rusia,negara yang kuat dan disegani.Untuk mewujudkan itu Putin bertindak secara tegas dan otoriter di setiap konstitusi.

Rusia menekankan pada kesadaran nasional (*national consciounsness*) dan apa yang disebut oleh Nicolai Petrov sebagai “patriotism yang tercerahkan” (*enlightened patriotism*). Menurut Putin melakukan *restorasi patriotisme* dan nilai-nilai tradisidalam visi danpragmatisme menjadi instrumen penting untuk mewujudkan misinya yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Rusia terpuruk pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1998.Artinya kesadaran politik harus terlebih dulu diutamakan dan kuat, kemudian memperbaiki ekonomi secara komprehensif.Aplikatif kebijakan politik Presiden Vladimir Putin adalah tidak lagi pro-Barat dan juga tidak sepenuhnya bersifat independen yang jelas kebijakan politik dalam dan luar negeri Rusia didasarkan dan disesuaikan dengan kepentingan nasional apa yang ingin segera dicapai. Banyak pengamat mengatakan wajah ganda yang dimiliki oleh Putin adalahdi satu wajah, Putin menginginkan melaksanakan liberarisasi ekonomi melanjutkan cita-

²Bambang Sunaryono (2012) *Rusia Pasca Komunisme, Jalan Panjang Menuju Perubahan*. Prudent Media.Hal-185.

cita pendahulunya, namun di wajah lain, Putin juga hendak membangkitkan Rusia agar disegani oleh negara lain dengan otoriter.

Mengenai kepentingan politik luar negeri Rusia yang pragmatis tidak lepas dari mekanisme kerja Rusia sebagai negara *great power* menganuti ideologi komunis yang cenderung bersifat ekspansif kesetiap lini kebijakan luar negerinya. Menyusulnya Revolusi Bolshevik tahun 1917, kaum Bolshevik mengembangkan sistem Soviet sama dengan sistem Tsar, sebagaimana kekuasaan Uni Soviet telah memperkuat dua karakter, yakni karakter sebagai sebuah negara supranasional dan karakter sebagai invasif. Falsafah komunis sangat menekankan internasional dan karakter sebagai kelas pekerja mendukung terciptanya ciri-ciri negara supranasional. Daya invasif diperbesar, yakni dengan menambah peran ekonomi negara yang kuat dan menghilangkan kepemilikan pribadi menjadi *komunal*. Faktor sejarah tidak bisa dihilangkan dalam menganalisa setiap kebijakan sebagaimana juga latar belakang perang dingin.

Sebagaimana keruntuhan Uni Soviet ditandai dengan tuntutan negara-negara Asia Tengah ingin memisahkan diri menjadi negara-negara independen menuju pembentukan organisasi *Commonwealth of Independent State* (CIS), organisasi kawasan tergabung terdiri dari Negara Kazakhsatn, Krgystan, Turkyministan, Uzbekistan, Tajikistan, Armendia, Azerbaijan, Bellarusia. Pencapaian Asia Tengah atas integrasi regionalisme masih sangat jauh maka dari itu ketergantungan terhadap Rusia khususnya di bidang ekonomi dan keamanan sangat dipentingkan begitupun sebaliknya kepentingan-kepentingan Rusia terhadap anggota negara-negara CIS.

Adapun kepentingan-kepentingan Rusia tersebut ialah menjaga keamanan di Kawasan tersebut supaya: *pertama*, kelancaran dalam suplai minyak dan komoditas perdagangan lainnya(peralatan militer) dari Rusia ke negara-negara Asia Tengah dan Timur Tengah. Misalnya, China, Iran, dan India. Impor minyak ke Rusia selama ini memasuki pasaran internasional yaitu Eropa Barat melalui Laut Baltik dan laut Hitam untuk memasuki pasar Eropa. Mengingat bahwa kawasan Asia Tengah menghubungkan antara Rusia dan China. Jadi dalam rangka menjaga kestabilan keamanan di Kawasan Asia Tengah tentu akan membawa pengaruh bagi kelancaran suplai minyak dan komoditas perdagangan Rusia.

Kedua, dalam rangka melindungi eksistensi etnis Rusia di Kawasan Asia Tengah pasca runtuhnya Uni Soviet. Rusia sebagai negara pewaris Uni Soviet memiliki kepentingan untuk melindungi keberadaan etnis Rusia yang tersebar di negara-negara bekas jajahan Soviet. Keberadaan etnis Rusia tersebar di Kazakhstan mencapai presentase 37 %, di Kyrgystan 21,5%,Turkmenistan 9,8%,Tajikistan 3,5%, dan di Uzbekistan 8,3%.³Jumlah etnis Rusia yang sangat besar yang tersebar di negara-negara bekas jajahan Uni Soviet tersebut berbanding lurus dengan kuatnya pengaruh mereka bagi pelaksanaan pemerintahan di negara-negara tersebut.Kuatnya pengaruh inilah yang kemudian dianggap sebagai peluang oleh Pemerintah Rusia sebagai pengontrol dan berpengaruh dalam mekanisme pengambilan kebijakan di organisasi tersebut.

³[file:Asia Tengah Kepentingan Rusia dan potensi konflik Pasca Timur Tengah- Verum Factum \(Kebenaran adalah Tindakan\).html](#)

Ketiga, kepentingan nasional berikutnya yaitu Rusia ingin menguasai sumber daya alam. Potensi alam ini tentu saja menjadi target dalam memenuhi ekonomi dalam negeri Rusia, seperti keamanan energi (*Energy Security*). Sumber keamanan energi termasuk suplai minyak sebagai produksi perkembangan teknologi nuklir dari uranium dan mengingat bahwa sumber daya alam juga tidak dapat diperbaharui dalam waktu singkat sehingga produktifitas energi sangat terbatas. Meskipun Rusia memiliki sumber daya alam yang mampu memproduksi sendiri, tidak menutup kemungkinan Rusia juga tetap meningkatkan kerjasamanya.

Keempat, kepentingan Rusia sekaligus cita-cita politik adalah upaya Rusia menciptakan imajinasi politik yang mendukung konstruksi identitas tunggal, yakni Rusia yang merupakan negara eks-Soviet tentunya memiliki romantisme masa lalu. Pembentukan identitas tunggal ini telah menjadi landasan dasar bagi arah kebijakan politik luar negeri Rusia khususnya dalam menjaga keamanan dalam dan luar negeri yang ditawarkan Vladimir Putin sejak tahun 2000. Geopolitik Rusia merupakan sebuah dikotomi memperoleh kekuasaan hegemoni di seluruh kawasan Asia Tengah. Rusia telah membangun beberapa jumlah pemukiman atau markas tentara Rusia dan Slava Timur, Belarus, utara Kazakstan (Utara Seberian).

Kelima, tidak kalah pentingnya lagi adalah Asia Tengah dijadikan sebagai *buffer zone* sebagaimanaupaya membendung lawan ideologi pada masa Perang Dingin. Meskipun perang dingin telah berakhir tetapi tidak menutup kemungkinan perang ideologi antara Block Barat dan Timur tetap berlangsung. Sebagaimana telah beroperasinya *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) di beberapa bagian wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah. Artinya kehadiran NATO menimbulkan kecemasan bahwa hegemoni dan imperialisme Barat akan terus berjalan. NATO telah melakukan ekspansi militer ke arah perbatasan Rusia. Tercatat proses militerisasi yang dibangun di daerah tetangga Rusia. “prinsip-prinsip keamanan yang sama dan tak terpisahkan sedang dihormati di wilayah Euro-Atlantik, Eurasia dan Asia-Pasifik.”⁴

Pengaruh Rusia memang telah sukses ditanamkan di kawasan tersebut sejak Uni Soviet berkuasa. Bagi Rusia kawasan Asia Tengah tidak hanya menjadi kawasan yang strategis tetapi juga menjadi kawasan penentu bagi penciptaan keberhasilan ekonomi pembangunan ekonomi dalam negerinya. Cita-cita identitas tunggal sebagai visi dan tujuan universal Rusia adalah fondasi yang ingin ditegakkan.

Terbukti sejak Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin, pertumbuhan ekonomi secara signifikan meningkat mencapai Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 7% ditahun 2007, bahkan Rusia menempati urutan ketiga sebagai negara memiliki cadangan devisa terbesar berjumlah 400 miliar dollar AS (setelah Jepang dan RRC). Semua pencapaian itu tidak lepas dari kebijakan politik luar negeri yang pragmatis dan

⁴[file:///www.Sembilan Strategi Keamanan Nasional Rusia 2016.html](file:///www.Sembilan%20Strategi%20Keamanan%20Nasional%20Rusia%202016.html)

dominatif. Tidak hanya pada ekonomi tetapi juga kesuksesan pada penjagaan keamanan, meningkatnya kesetabilan dan ketatnya keamanan berarti semakin besarnya pengaruh Rusia, semakin memperjelas dominasi Rusia atas kawasan Asia Tengah.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Strategi Politik Luar Negeri Rusia dalam Menjaga Keamanan Kawasan Asia Tengah dibawah Presiden Vladimir Putin?

C. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Dalam pandangan Holsti (1983:97-98), negara sebagai aktor yang memiliki tujuan-tujuan, aspirasi, kebutuhan sikap, pilihan dan tindakan politik luar negeri yang dipengaruhi oleh atau terbentuk oleh struktur kekuatan dan distribusi kekuasaan dalam politik internasional. Ia membagi empat komponen utama dalam PLN (Politik Luar Negeri) yaitu (1) orientasi-orientasi politik luar negeri, (2) peran-peran nasional, (3) tujuan-tujuan dan (4) tindakan-tindakan.⁵

Selanjutnya, menurut Holsti (1983:98), orientasi dasar PLN ada tiga, diklasifikasikan sebagai berikut, orientasi pertama disebut isolasi dimana untuk menjaga kepentingannya, negara memilih membatasi hubungannya dengan negara lain. Komponen kedua dari PLN adalah peran-peran nasional dan konsepsi tentang peran yang merupakan turunan dari komponen pertama orientasi politik luar negeri suatu negara.

⁵ Abu Bakar Eby Hara, (2011) *Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Penerbit Nuansa. Hal 39-40.

Konsep peran nasional ini adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh para pembuat kebijakan atau keputusan tentang komitmen, aturan tindakan sesuai untuk negara. Komponen ketiga disebut tujuan-tujuan PLN yang mengacu pada komponen sebelumnya, didalam komponen ini terdiri dari tiga macam kepentingan, yaitu, nilai-nilai dan kepentingan ‘inti’ atau *core* dimana secara universal semua orang akan rela mengorbankan diri untuk tujuan yang ingin digapainya. Kemudian komponen dalam tujuan jangka menengah seperti kepentingan ekonomi dan perdagangan. Komponen yang terakhir adalah tujuan dan kepentingan jangka panjang yang sering disebut sebagai visi dan rencana universal.⁶

1. Strategi Kebijakan Luar Negeri

Menurut Lovell, strategi adalah serangkaian langkah-langkah (*moves*) atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.⁷

Dalam politik luar negeri strategi merupakan pola perencanaan yang digunakan para penguat keputusan untuk memajukan serta mencapai kepentingan nasionalnya dengan disertai usaha mencegah negara lain melakukan tabrakan atau menghambat tercapainya kepentingan itu. Jhon.P Lovell membagi strategi atas dua komponen yaitu *komponen ofensif* (bentuk untuk mendapatkan perolehan dan keuntungan) dan *komponen defensive* (bentuk untuk mencegah kehilangan atau kerugian).

⁶ Ibid, hal 41

⁷ Mohtar Masoed (1998) *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisa dan Reosisasi*. Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada. Hal- 90.

Dalam analisis strategi pada politik luar negeri, pembuat keputusan harus mengetahui situasi dan menentukan sasaran yang hendak dituju. Teori strategi didasarkan atas pertimbangan pembuat keputusan dalam rangka memperhitungkan untung dan rugi dalam pencapaian tujuan strategi itu sendiri.⁸ Mohtar Ma' oed menjelaskan landasan dasar teori strategi ini berasumsi pada tiga hal, yaitu :

Pertama, Prilaku politik luar negeri suatu bangsa-bangsa pasti diarahkan sebagai langkah untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan kepentingan tersebut. *Kedua*, Para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi negara-negara bangsanya dengan menelaah alternative tindakan yang masing-masing dinilai berdasarkan analisisnya biaya dan hasil. *Ketiga*, Dalam dunia saling bergantung sehingga keputusan harus memperhitungkan tujuan dan strategi negara-bangsa yang lainnya.

Dalam urain tersebut, suatu negara akan melaksanakan politik luar-negerinya sebagai jalan untuk mencapai kepentingan negaranya. Dengan politik luar negeri yang terjalin dalam suatu hubungan-internasional, upaya pencapaian kepentingan negara yang bersangkutan tidak secara nyata terlihat tapi terlaksana secara implisit melalui kebijakan politik luarnegerinya.

Asumsi dasar dalam penjelasan perspektif ini yaitu semua negara dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional di dalam kancah politik global. Fokus perhatian para

⁸ Moctar Mas'oed, ibid, hal 90-91

penstudi yakni lebih menekankan pada transaksi/interaksi antar pihak-pihak yang terlibat daripada mengkaji suatu peristiwa hanya dari sudut pandang pihak yang memberikan tanggapan saja. Didalam perspektif strategi, pola umum dari kesinambungan dan perubahan politik luar negeri dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan strategis para pembuat keputusan.

Lovell telah menyarankan adanya beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses perumusan strategi kebijakan luar negeri suatu negara -bangsa, yaitu: struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Dari empat faktor tersebut mempertegaskan bentuk-bentuk interaksi antar negara bagi perspektif strategi yang meliputi *leadership strategy*, *confrontation strategy*, *accomodative strategy*, dan *cocordance strategy*. Pejelasan dari empat strategi tersebut dapat dikalisifikasi sebagai berikut :

leadership strategy, istilah strategi ini menunjukkan adanya posisi pengawasan melalui cara persuasif dan tawar menawar dari pada melalui cara kekerasan (meskipun terkadang menggunakan cara kekerasan mungkin saja dapat dikombinasikan dengan cara persuasi) Pada tipe strategi ini suatu negara menganggap kapabilitasnya superior dan strategi Negara-bangsa lain mendukung.

Corcodance strategy menunjukkan adanya suatu kepentingan yang saling menguntungkan. Namun dapat disadari bahwa kapabilitas relatif lebih rendah daripada negara lain dengan negara lain. Misalkan negara B memiliki kapabilitas relatif lebih rendah daripada negara A, maka pembuat keputusan negara B akan berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan negara A, dengan cara menghindari

pembuatan kebijakan luar negeri yang dapat menimbulkan konflik dengan negara A, dan negara B akan berusaha menyesuaikan dengan inisiatif-inisiatif negara A.

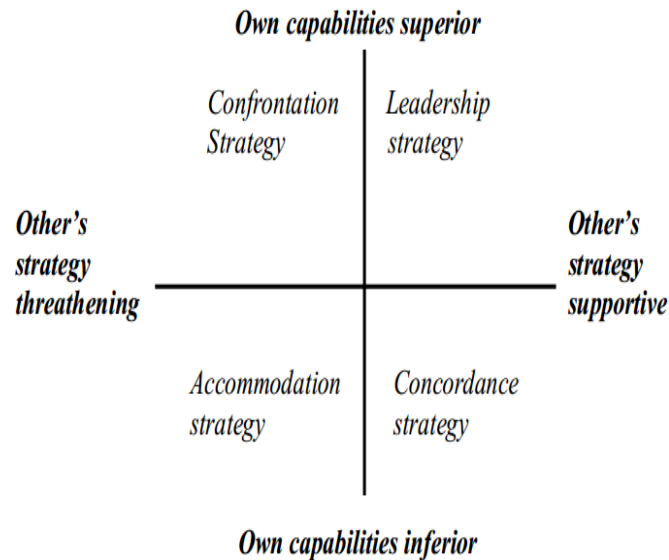
Sedangkan dalam atmosfir *confrontation strategy*, negara-bangsa A akan mencoba mempertajam isu-isu yang mengandung konflik kepentingan dengan negara B, dan memaksa negara B untuk memodifikasi posisinya melalui pengakuan terhadap superioritas kapabilitas negara A.

Accommodation strategy lebih dikenal sebagai strategi membuat kejakan penyusuain-penyesuaian untuk menghindari suatu konflik, meskipun kemungkinan besar negara yang dihadapinya menggunakan strategi konfrontasi. Penjelasananya bahwa apabila kapabilitas negara A lebih relatif besar dibandingkan negara B, maka negara B akan membuat kebijakan-kebijakan strategi penyusuain agar tidak menimbulkan konflik menjadi sumber permasalahan.

Lihatlah pada penjelasan gambar di bawah ini bagaimana ineraksi antar strategi yang dikeluarkan antar negara :

Gambar: Gambar 1.1

Policy makers' estimates of the strategy of another nation-state and estimates of their own relative capabilities as determiants of the style of intraction.⁹



Model ini diketahui sebagai model strategik (model reaksi-interaksi) yang digunakan oleh analis (terutama para ahli sejarah diplomasi) untuk menerapkan tiap respon sebagai suatu perhitungan rasional (*rational calculation*) untuk menghadapi tindakan yang dilakukan pihak lain.

Hubungan Multilateral yang dibangun oleh Rusia di kawasan asia Tengah merupakan sebagai langkah kerjasama yang baik dalam menjaga keamanan di kawasan

%file:www.Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri, Nur Rahmawati.html

tersebut. Kerjasama multilateral tersebut dibangun berdasarkan *open-fit* melalui organisasi (*Commonwealth of Independent State*) CIS (dianggotai oleh Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kirgystan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan) sebuah organisasi regional yang didominasi oleh Rusia. Seperti yang dilaksanakan oleh para pemimpin negara-negara pecahan Uni Soviet yang selanjutnya berkumpul dalam forum Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Dushanbe, dalam rangka mendatangi dokumen tentang penumpukan kekuatan militer antara Rusia Asia Tengah.

Dokumen tersebut merupakan konsep kerjasama militer, dimana setiap negara anggota CIS untuk saling memperpanjang izin pangkalan militer masing-masing negara. Dalam kesempatan ini Rusia berencana memperbaharui armada pangkalan militer udara dan mensuplai bantuan militer berupa uang untuk Kirgistan, Tajikistan dan negara-negara lainnya. Menurut Alexander Golts, seorang analisis militer yang berbasis di Moskow, mengatakan bahwa selama latihan militer, Rusia tidak hanya melatih pasukannya tetapi juga meningkatkan kontak antara para pemimpin politik.

Tujuannya untuk bekerja pada skenario guna mendapatkan "hak sah" untuk campur tangan dari pasukan Rusia ketika terjadi konflik.¹⁰ Meningkatnya kehadiran militer Rusia dan kerjasama politik dengan negara-negara anggota CIS merupakan bentuk kepentingan strategis Rusia dalam upaya terus terlibat dalam menjaga keamanan di kawasan tersebut. Keamanan antar negara akan terus ditingkatkan

¹⁰[file:// Rusia Ancang-ancang Tumpuk Militer di Asia Tengah.html](#)

mengingat ancaman-ancaman kelompok teroris dan ekstrimis yang dapat menembus ke dalam wilayah perbatasan Afghanistan dan Asia Tengah.

Melalui Politik luar negeri Rusia di kawasan Asia Tengah juga telah mengubah orientasi, tujuan, dan pola formulasi kebijakan dan tindakan politik luar negeri Federasi Rusia. Pada masa Uni Soviet tindakan politik luar negeri Rusia dan kebijakannya ditentukan berdasarkan ideologi (*class struggle and world communism*). Sebagai negara yang berdaulat, Rusia membentuk kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk memperkuat kedudukannya di dunia internasional sehingga Uni Soviet cenderung ekspansionis. Hubungan antara Rusia dan Asia Tengah masih turut mewarnai hubungan antar kedua belah pihak dengan cara menjalin hubungan baik, dengan tetap memperhatikan kebijakan dalam kerangka "*Near Abroad*".

Pada kesempatan ini Rusia mencoba memaksimalkan politik luar negeri dengan cara mengorganisir, mengkoordinasi dan mengkoordinir setiap negara di kawasan tersebut. Salah satu untuk mencapai itu, Rusia bertekad membentuk kekuatan tunggal. Konteks ini telah menjadi inti arah kebijakan luar negeri yang di kampanyekan oleh Presiden Rusia Boris Yeltsin dan Perdana Menteri Rusia Igor Gaidar sejak tahun 1991 sampai Vladimir Putin saat ini. Intensitas keamanan kopulatif dalam menjagaperekonomian melakonipenjagaan ketat jalur pipa gas dan minyak menjadi komoditas negaranya, agar tetap menjadi negara distributor dan supplier. Produktifitas energi dan minyak komponendemi melancarkan aktivitas industri dalam negeri.

Posisi-posisi strategis diatur sebagai kunci untuk mengamankan kepentingan politis Rusia di negara-negara sekitarnya, baik Eropa maupun Asia. Sejak tahun 2002

di samping menjadi negara pengirim (*transporter*) gas dari Asia Tengah juga menjadi perantara (*intermediary*) antara para penjual dan pembeli gas dengan Negara Asia Tengah lainnya. Dalam menjaga hubungan multilateral yang tetap terkoordinir dan terkoordinasi antara Rusia dengan negara-negara kawasan Asia Tengah, Rusia membingkai kepentingan politisnya melalui formula-formula kebijakan luar negerinya supaya tetap terjalin.

Dalam pernyataan Komite Negara ditegaskan, bahwa kekhawatiran akan terjadinya perpecahan nasional dan besarnya kecenderungan pemisahan diri beberapa negara untuk menjadi negara merdeka merupakan alasan utama kudeta. Peristiwa itu dilakukan sehari sebelum Gorbachev mendatangi *Union Treaty* baru sebagai langkah awal karena pembubaran Uni Soviet. *Treaty* ini ditandatangani oleh Gorbachev, Leonid Kravchuk dari Ukraina, dan Stanislav Shushkevich dari Belarussia yang kemudian tertuang dalam sebuah deklarasi pembentukan persemajmuran Negara-Negara Merdeka atau *Commonwealth of Independent States* (CIS) yakni sebuah persekutuan dan persemajmuran negara dari beberapa republik bekas Uni Soviet.¹¹

Kekuatan *oligarchs* Rusia tertanam dimana saja. Mereka memberi fasilitas dan dukungan tidak terbatas pada nama-nama besar untuk menjabat di posisi-posisi strategis untuk terus terlibat dalam menjaga kepentingan luar negerinya, seperti Potanin yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Berezovsky menjabat selaku Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional yang pada gilirannya pula

¹¹Bambang Sunaryono (2012) *Rusia Pasca Komunisme, Jalan Panjang Menuju Perubahan*. Prudent Media. Hal-23.

diangkat sebagai Sekretaris Persemakmuran Negara-Negara Merdeka *Commonwealth of Independent State*(CIS). Kedua nama ialah mereka yang mendukung penuh kinerja pemerintahan dan merupakan kelas pekerja yang dapat dipercayai oleh presiden Yeltsin, sehingga mereka memiliki posisi yang istimewa dalam struktur pemerintahan.

2. Konsep Geopolitik

Konsep geopolitik secara etimologi kata geopolitik berasal dari kata Yunani, yaitu *geo* berarti bumi dan *politeia*, *poli* berarti masyarakat yang berdiri sendiri dan *teia* berarti urusan.¹²Sedangkan secara epistemologi geopolitik merupakan studi dari kajian wilayah geografis yang ditujukan untuk menjelaskan, memahami dan memprediksi perilaku politik luar negeri suatu negara. Kajian geopolitik telah ada sejak abad ke-19, ketika ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan penjelasan dan prediksi yang deterministik. Hal tersebut merupakan analisis politik dalam hubungan dengan fitur geografis seperti akses ke laut atau sumber daya alam.

Kondisi suatu geografis, politik, ekonomi secara garis besar ditentukan oleh keadaan geopolitik. Menurut Henry Kissinger, akar realisme geopolitik sudah dikenal lama sejak masa lampau, bahkan sampai Cardinal Richelieu menyatakan bahwa “negara tidak mempunyai prinsip, hanya kepentingan”. Doktrin ini mempunyai sedikit kesamaan dengan doktrin *laissez-faire*. Bagi *laissez-faire*, subyek itu adalah individu partisipan pasar, bagi geopolitik subyek itu adalah negara.

¹²Ermaya Suradinata. *Geopolitik dan geostrategi dalam mewujudkan integritas negara kesatuan Republik Indonesia*. Hal 12-14.

Dari buku Martin John dkk, mereka mendefinisikan *political geography* (politik geografi) sebagai studi tentang proses-proses politik, yang berbeda dengan ilmu politik lainnya, yang penekanannya diberikan kepada pengaruh geografis suatu negara dan analisis spasial. Definisi tersebut menjelaskan pengaruh yang cukup signifikan bagi suatu negara dalam menentukan kebijakan politik luar negeri, yang terkait dengan kondisi geografis. Menurut penulis dalam definisi tersebut bahwasanya politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain sangat ditentukan oleh letak geografi, disamping untuk memetakan kekuatan politik negara-negara lainnya.

Selain itu geopolitik juga mampu membuka rute perdagangan baru dan inovasi teknologi dalam transportasi dan/atau komunikasi, ada secara independen dari motivasi strategis para politisi atau geostrategik mereka. Negara yang melindungi wilayah rumah mereka (sudah kuasanya), dan politik mengontrol sumber dan jalur transportasi mereka akan meningkatkan dan mempertahankan kekuatan relatif mereka.

Meskipun kondisi Asia Tengah kurang stabil, tetapi hal itu memiliki arti yang cukup signifikan sebagai domain geopolitik. Tanpa terkecuali Rusia yang memang memandang kawasan ini sebagai “ruang taman belakang” mereka (istilah yang digunakan oleh Alexandros Petersen dan Katinka Barysch). Letak geopolitik ini mengkokohkan posisi politik Rusia di bagian timur dan selatan. Hubungan geografis Rusia dengan perbatasan-perbatasan di beberapa wilayah Asia Tengah akan memecahkan hambatan-hambatan realitas yang selama ini mengancam Rusia. Menurut Gearoid O Tuathail, geopolitik imprealisme terdapat korelatif menyatukan objektivitas dalam sebuah pemahaman politik.

Menggunakan konsep geopolitik ini, penulis berpendapat bahwa Rusia dengan sangat teliti dan hati-hati mengamati posisi geografisnya. Letak geografis yang bertetangga langsung dengan Kazakhstan merupakan faktor penting bagi suksesnya politik luar negerinya. Status *Landlock* atau negara yang terisolasi dari lelautan membentuk suatu keadaan aman di sepanjang daratan dan menambah kekuatan Rusia sampai ke Eropa. Geopolitik ini dibina oleh Rusia agar dapat menjadi jembatan untuk mengkoordinir Asia Tengah secara politis. Posisi politik Rusia akan mempengaruhi kesepakatan kerjasama ekonomi dengan adanya pengadaan jalur pipa yang dilancarkan untuk memonopoli jalur distribusi energi (minyak dan gas) di beberapa kawasan Asia Tengah.

Begitu pentingnya posisi Asia Tengah bagi Rusia, maka untuk merangkul dan menjaga hubungan baik dengan Negara-negara Asia Tengah, Rusia menggunakan kebijakan *near abroad (near abroad policy)*. Kebijakan ini salah satu upaya Negara Rusia memberi pengaruh dan merangkul negara-negara bekas Uni-Soviet. Dalam prospektif eurasianis mengungkapkan bahwa Rusia membutuhkan kerjasama yang solid dengan negara tetangganya bila mereka ingin mengulang kembali masa kejayaan seperti Uni Soviet. Kebijakan Rusia terkait dengan *near abroad policy* di bidang energi dilakukan dengan dua macam cara, yaitu *Coercive Energy Policy* dan *Cooperative Energy Policy*.

Menurut Ryan C. Maness *Coercive Energy Policy* dilakukan jika negara-negara tetangga tidak lagi mau bekerjasama dengan Rusia dan cenderung berpaling kepada Barat khususnya Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Rusia selalu terlibat

dalam persaingan, isu-isu yang berkaitan dengan energi dalam ruang pascaSoviet yang melibatkan Amerika Serikat menjadi sangat menonjol, yang dapat menyebabkan kebijakan energi koersif luar negeri yang terlalu politik dan ekonomi terhadap tetangga dekat yang kian dekat dengan pemerintah Amerika Serikat atau perusahaan-perusahaan energinya. Kebijakan koersif Rusia telah diberlakukan di negara trans Kaukasus, Krimea, dan yang terbaru Ukraina di Provinsi Donetsk.

Sedangkan *Cooperative Energy Policy* merupakan kebijakandengan melakukan kerjasama dengan para tetanggayang dekat dengan Rusia. Dalam hal ini Rusia cenderung mempertahankan pengaruhnya melalui kebijakan *Cooperative Energy Policy*, hal ini terlihat jelas dengan hubungan yang cukup harmonis antara Rusia dengan Kazakhstan.

Keinginan Rusia untuk mengontrol Asia Tengah pada umumnya bisa dilihat dari pergeseran kebijakan luar negeri Rusia terhadap pendekatan yang lebih lembut (*soft diplomacy*) dalam hubungan bilateral lebih korporatif. Rusia berusaha untuk mempertahankan rezim yang sedang berkuasa karena ramah dengan Rusia. Oleh karena itu secara serius Rusia mendukung pemerintahan dari setiap negara-negara Asia Tengah yang mendukung politik luar negerinya seperti pemerintahan Nazarbayev dari negara Kazakhstan. Rusia mengejar kerjasama ekonomi dalam rangka meningkatkan pengaruhnya di Asia Tengah dan untuk mempromosikan kepentingan melalui hubungan ekonomi.

Geopolitik Rusia diturunkan dari fitur-fitur geopolitik yang pernah dimiliki oleh Uni Soviet. Geopolitik Rusia sebagian besar meliputi warisan masa lalu yang mana

Rusia pernah menghegemoni di kawasan tersebut. Berkat geopolitik antara Rusia dan Asia Tengah, Rusia memiliki peluang besar dalam menginisiasi imajinasi politik luar negerinya untuk mengontrol secara politis dan menjalankan penetrasi dengan cara membentuk organisasi-organisasi internasional seperti *Commonwealth of Independence State (CIS)*, *Shanghai Cooperation Organizations (SCO)*, *Black Sea Economic Force (BLACKSEAFOR)*, *The Caspian Sea Force (CASFOR)*, dan *the Collective Security Treaty Organization (CSTO)*. Orientasi kepentingan dan *power play* di wilayah tersebut ditujukan untuk menjamin produksi dan konsumsi energi bagi negara Rusia yang berkepentingan agar tetap aman.

GAMBAR 1.2
Peta Rusia dan Kawasan AsiaTengah¹³



¹³<https://kisahmuslim.com/5331-asia-tengah-dan-kaukasus-di-bawah-penjajahan-rusia.html>

Dengan kata lain, geopolitik adalah studi proyek sedangkan geostrategi merupakan studi pelaksanaan, biasanya pelaksanaan peperangan.¹⁴ Peperangan sering kali terjadi di suatu ruang (*space*). Ruang merupakan komponen utama dalam penampilan geostrategi. Para personil militer baik dari tingkat jendral, komanda, dan tentara harus memahami ruang/wilayah peperangan tersebut untuk menganalisa dan membentuk suatu strategi.

D. Hipotesa

Kebijakan Politik luar negeri dibawah presiden Vladimir Putin menggunakan *leadership strategy* dengan pembentukan *Commonwealth of Independent State* (CIS) atau negara-negara bekas jajahan Uni Soviet sebagai kekuatan tunggal untuk mengorganisir, mengkoomodir serta mengkoodinir kawasan Asia Tengah lebih terstruktur. Konfigurasi keberhasilan politik Rusia semakin dinamis dan berkembang mengikuti pola globalisasi.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang bagaimana strategi Rusia dalam menjalankan politik luar negerinya di Kawasan Asia Tengah.
2. Mengetahui adanya faktor-faktor pendukung keberhasilan Rusia dalam menjalankan Politik Luar Negerinya di Kawasan Asia Tengah.

¹⁴Doed Joesoef (2014) *Studi Strategi Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT Kompas Nusantara. Hal-34.

3. Mengetahui kekuatan Kebijakan Luar Negeri Rusia di bawah Vladimir Putin yang mampu mempengaruhi politik dan mengkoordinir Kawasan Asia Tengah.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif, yaitu bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor dan alasan kebijakan Luar Negeri Rusia di Kawasan Asia Tengah selama periode Putin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui *library research* yaitu berdasarkan dari buku dan media internet, jurnal, bulletin, surat kabar serta beberapa informasi yang mendukung penelitian. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode konten analisis dan kajian sejarah yaitu menjelaskan dan menggambarkan data berdasarkan sumber-sumber tertulis yang ada.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi periodisasi jabatan perdana menteri Rusia Vladimir Putin dalam menjalankan Kebijakan Politik Luar Negerinya di Kawasan Asia Tengah selama jabatan Putin menjadi Presiden dari tahun 2000-2008.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, kerangka Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkaun Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Membahas tentang kepentingan-kepentingan Rusia di Kawasan Asia Tengah dan tujuan-tujuan kepentingannya. Dalam kepentingan Rusia terdapat tindakan-tindakan aklerasi dan asertasi oleh Rusia demi percepatan pertumbuhan ekonomi domestik Rusia.

BAB III Membahas tentang posisi strategis Asia Tengah dan potensi kawasan tersebut. Rusia menyadari bahwa posisi Asia Tengah sebagai *bargainning position* dan *buffer state* menimbulkan persaingan ketat antara negara-negara besar. Oleh sebab itu Asia Tengah dijuluki kawasan “*New Great Game*”. Dengan cepat Rusia mengamankan kawasan agar tetap didominasi oleh Rusia.

BAB IV Membahas tentang strategi kebijakan politik luar negeri dan aplikatifnya dalam mengamankan Kawasan Asia Tengah.

BAB V Kesimpulan.